



Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa

Taun¹, Nia Amelia Kartika², Noer Nilam Sari³, Oktaviano Mangaraja Sihotang⁴, Putri Aulia Azhar⁵,
Rafly Oktavairuz⁶, Septi Amelia⁷, Vella Novira Fahma⁸

Universitas Singaperbangsa Karawang, ¹taunfh.unsika.ac.id,
²2210631030121@student.unsika.ac.id, ³2210631030122@student.unsika.ac.id,
⁴2210631030123@student.unsika.ac.id, ⁵2210631030128@student.unsika.ac.id,
⁶2210631030129@student.unsika.ac.id, ⁷2210631030142@student.unsika.ac.id,
⁸2210631030149@student.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Juli 2023
Disetujui: 27 September
2023

Kata Kunci:

Demokrasi
Pemilihan umum
Golput

ABSTRAK

Abstrak: Fenomena golongan putih yang semakin tinggi dari masa ke masa adalah bentuk tanggapan kritis masyarakat untuk menyikapi demokrasi yang tidak benar dan tidak bekerja untuk masyarakat. Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah mencari penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka atau golput. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya golput dalam pemilu dan mengetahui perkembangannya dari masa ke masa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi rujukan ilmiah dari sumber primer dan sekunder melalui dokumen yang relevan seperti buku, jurnal, artikel dan berita dari media massa terkait. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa penyebab fenomena golput merupakan reaksi atas fenomena politik yang gagal mengubah masyarakat seperti korupsi merajalela, amoralitas meningkat, banyak aset negara dijual kepada asing, partai politik saling mengalahkan dan anggota parlemen mengejar kebijakan moneter. Fenomena politik ini berulang kali terjadi di semua partai demokrasi kita dari era pemilu Orde Baru hingga akhir-akhir ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa golput merupakan gerakan yang harus disikapi melalui pendidikan dan sosialisasi politik untuk mengembalikan semangat memilih dalam pemilu..

Abstract: The phenomenon of white groups that is getting higher from time to time is a form of critical response from the community to respond to democracy that is not right and does not work for the community. The problem discussed in this research is to find the causes of people not using their voting rights or abstaining. The purpose of this research is to find out the causes of abstention in elections and find out its development from time to time. The research method used is a qualitative method using a theoretical basis as a guide to focus on research based on facts in the field. Data collection techniques are carried out by collecting various sources of scientific reference information from primary and secondary sources through relevant documents such as books, journals, articles and news from related mass media. Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be seen that the cause of the abstention phenomenon is a reaction to political phenomena that fail to change society such as rampant corruption, increased immorality, many state assets are sold to foreigners, political parties beat each other and parliamentarians pursue monetary policies. This political phenomenon has repeatedly occurred in all our democratic parties from the New Order election era until recently. Thus, it can be concluded that abstention is a movement that must be addressed through political education and socialization to restore the spirit of voting in elections.

A. LATAR BELAKANG

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan peristiwa yang penting karena memberikan kesempatan kepada warga negara tersebut untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka di

pemerintah. Namun, terjadinya fenomena golongan putih (golput) yang tidak memberikan suara mereka menjadi masalah yang mengganggu dalam pemilu dari masa ke masa. Kualitas demokrasi secara keseluruhan dapat dirugikan oleh tingginya tingkat golput, yang mungkin merupakan tanda kurangnya keterlibatan

politik dan berdampak pada legitimasi pejabat terpilih. Diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab fenomena golput ini agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat demokrasi negara[1].

Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya untuk menyelidiki fenomena golput ini. Penelitian-penelitian tersebut telah mencoba menunjukkan variabel-variabel seperti keterlibatan dalam aktivitas politik, usia, tingkat pendidikan, dan status ekonomi yang mempengaruhi perilaku memilih. Selain itu, beberapa penelitian telah melihat variasi partisipasi pemilih dalam berbagai pemilu dan menghubungkannya dengan perubahan sosial di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun sudah ada beberapa analisis, namun masih terdapat kesenjangan dalam penelitian ini, khususnya dalam kurangnya pemahaman menyeluruh tentang perbedaan tingkat golput pada pemilu yang berbeda dan pengaruh dari perubahan kebijakan atau sistem pemilu dalam mengatasi fenomena golput dari masa ke masa. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual diperlukan untuk mengungkapkan penyebab yang lebih mendalam dari fenomena golput dalam pemilu dari waktu ke waktu[2][3][4].

Terdapat perbedaan antara teori yang diusulkan dan keadaan nyata di lapangan dalam penelitian sebelumnya yang mencoba mempelajari fenomena golput pemilu dari masa ke masa. Penelitian sebelumnya cenderung belum memberikan analisis yang komprehensif dan menyeluruh tentang perubahan pola golput dari waktu ke waktu serta perbedaan angka golput pada pemilu yang berbeda. Kurangnya perbandingan antara pemilu yang berbeda dan keterbatasan dalam mempertimbangkan pengaruh perubahan kebijakan atau sistem pemilu dalam mengatasi fenomena golput menjadi hambatan untuk memahami secara menyeluruh penyebab golput dari waktu ke waktu[5][6].

Penelitian ini akan membantu memperluas pemahaman kita tentang fenomena golput dalam pemilu dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis dan membandingkan berbagai pemilu, penelitian ini akan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pola golput berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana perubahan kebijakan atau sistem pemilu berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang penyebab fenomena golput serta rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yang akan membantu memperkuat demokrasi di negara kita.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan golput dalam pemilu berubah dari waktu ke waktu dan untuk menganalisis

perbedaan dalam tingkat golput di berbagai pemilu. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana perubahan kebijakan atau sistem pemilu mempengaruhi partisipasi pemilih. Dengan tujuan ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena golput serta rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di masa mendatang, sehingga kontribusi demokrasi dapat diperkuat dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dapat ditingkatkan

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan proses dan makna dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan studi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Landasan teori merupakan unsur dari sebuah penelitian yang berperan sangat penting untuk membantu memberikan gambaran umum secara luas dan menyeluruh mengenai latar penelitian dan menjadi topik dalam pembahasan hasil penelitian.

Objek penelitian yang dapat digunakan dalam metode kualitatif dapat dikatakan cukup terbatas. Teknik pengumpulan dan pembahasan data yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi referensi ilmiah dari sumber primer dan sekunder melalui literatur terkait seperti: buku, majalah, artikel dan media massa terkait.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau tekstual yaitu studi yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis tergantung pada konteksnya. Bahan dapat berasal dari catatan yang sudah dipublikasi, buku teks, catatan harian, jurnal, surat, film, manuskrip, artikel, dll. Untuk mendapatkan kredibilitas, peneliti dokumen juga harus memastikan bahwa teks tersebut asli. Jenis penelitian ini juga dapat mengungkap pemikiran seseorang yang tertuang dalam buku atau manuskrip yang diterbitkan. Pendidik juga menggunakan metode penelitian ini untuk menilai keterbacaan suatu teks atau untuk menentukan seberapa baik pemahaman topik tertentu dalam suatu teks.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Penyebab Terjadinya Golput Menurut Government's Role Failure, World Economic Forum di Universitas Harvard

Golput mengatakan masalah ekonomi lebih penting daripada politik ketika berhadapan dengan negara. Artinya masyarakat mengutamakan topik memasak nasi.

Sejauh mana kebutuhan gizi terpenuhi lebih penting daripada masalah pelaksanaan hak mereka dalam konstelasi politik. Artinya, masalah ekonomi, pekerjaan dan fokus masa depan adalah masalah politik di negeri ini, masalah lama yang belum terselesaikan secara optimal[7]. Yang jelas golput gerakan budaya harus disikapi melalui pendidikan dan sosialisasi politik untuk mengembalikan semangat memilih.

Banyaknya golput sangat kontraproduktif ketika diadakan pemilu, dan golput tidak pernah menghasilkan pemimpin yang baik. Seharusnya dari kalangan elit politik dan akademisi yang membangun Selain permasalahan di atas, golput juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kegagalan peran negara, demokrasi tanpa substansi, dan pemilu yang tidak langsung menguntungkan rakyat. Berdasarkan studinya sekitar tahun 2002 oleh World Economic Forum di Universitas Harvard, Government's Role Failure menyatakan bahwa kegagalan pemerintah dapat dilihat pada beberapa indikator seperti:

Kejahatan dan kekerasan tinggi, korupsi merajalela, opini publik terbelakang, dan suasana perang yang kuat. Suasana ketidakpastian dapat dilihat pada ketidakpastian di bidang ekonomi, keamanan, dan politik[8]. Di bidang politik, ia terutama melihat tiga masalah. Ketiga emosi dalam dunia politik tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini. Pertama, geopolitik, atau politik, kehilangan semangat dan orientasinya kepada masyarakat karena menembus sekat dan ruang tanpa batas geografis yang jelas dan menjadi ruang global di bawah pengaruh era informasi dan globalisasi. Kedua, politik ruang, ruang publik yang merepresentasikan orientasi politik mengalami disorientasi karena faktor spasial virtual yang mengutamakan pencitraan. Politik menjadi virtual tanpa realitas, karena ruang untuk janji mendominasi ruang untuk bertindak. Ketiga, karena politik waktu, yaitu hakikat dan substansi politik, tidak didahulukan, melainkan kecepatan dan kecepatan informasi untuk memajukan kepentingan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan manifestasi regenerasi dan rekrutmen partai, serta munculnya anggota parlemen yang bermasalah dan dipenjara. Tiga isu utama inilah yang membentuk politik kita, seksualitas Yasraf A., dan politik komoditas.

Akibat perubahan fungsi politik ini, masyarakat menjadi tidak puas dengan aktivitas politik yang jauh dari kenyataan dan harapan. Fenomena golput merupakan reaksi atas fenomena politik yang gagal mengubah masyarakat. Sistem politik berubah, banyak partai politik baru bermunculan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah diselenggarakan. Semuanya dilakukan dengan harapan akan membawa perubahan dan perbaikan bagi masyarakat. Tapi harapan adalah harapan, korupsi merajalela, amoralitas meningkat, banyak aset negara dijual kepada asing, partai politik saling mengalahkan dan anggota parlemen mengejar

kebijakan moneter. Semua kebobrokan ini telah terjadi dari alam pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Apa yang orang harapkan dalam keadaan seperti ini? Mereka tidak berdaya dan hanya bisa menunjukkan keputusan dengan abstain pada setiap pemilihan gubernur atau pilkada. Sebaliknya, fenomena angka golput yang tinggi dan meningkat selama era reformasi menunjukkan ketidakpedulian publik yang meluas terhadap proses rekrutmen untuk memilih pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pergantian kepemimpinan tidak membawa perbaikan. Kesimpulan umum dapat ditarik bahwa tidak masalah siapa yang bertanggung jawab. Lalu mengapa kita harus mengadakan pilkada dan pilkada dengan biaya miliaran rupiah padahal kita sudah tahu hasilnya? Dalam situasi seperti ini, sangat sulit menemukan pemimpin yang bersih, jujur, amanah dan amanah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dan yudikatif. Krisis kepercayaan ini tidak lepas dari perilaku partai politik sebagai bagian dari infrastruktur yang mengolah, mengkader, dan mengolah elit politik. Ia menilai masyarakat Indonesia semakin apatis dan tidak lagi mengakui keberadaan partai politik karena tidak ditanggapi secara serius fungsi dan perannya dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat.

2. Fenomena Golput dari Era Reformasi Hingga Sekarang

Fenomena politik ini selalu muncul di setiap pesta demokrasi kita. Golput atau 'golongan putih' muncul di era pemilu Orde Baru hingga akhir-akhir ini. Fenomena politik ini berulang kali terjadi di semua partai demokrasi kita. Golput atau "kelompok putih" muncul pada masa pemilu Orde Baru hingga pemilu yang baru-baru ini terjadi di republik tersebut.

Sebagai contoh kasus, 500 warga Baduy Dalam memilih abstain dalam pilkada, berdasarkan laporan detik.com. Mereka berada di Desa Sibeo, Cikeusik dan Cikartawana, yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak, Banten. Orang Baduy melihat politik elektoral sebagai kekuatan pemecah belah dan tidak diperbolehkan berkampanye[9].

Tabel 1

Analisis Fenomena Golput dari Era Reformasi hingga Sekarang

| Nama Penulis dan Topik Artikel | Masalah Golput | Pemilu Tahun |
|--|---|--------------|
| Efniwati: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Hak Pilih pada Pilpres Kota Dumai Tahun 2009 (Studi Kasus Kabupaten Dumai Timur dan Distrik Say Sembilan)" | Pemilih menghadapi prosedur administratif, bekerja pada hari pencoblosan, ketertarikan politik pada pemilih sangat kecil, tidak menggunakan hak pilih karena suatu perhitungan. | 2009 |

| | | |
|--|---|------|
| Bahtiar Rifa'i - detikNews: "500 Warga Baduy Dalam Pilih Golput di Pemilu" | Pilihan tak mencoblos merupakan aturan adat Baduy Dalam yang mau tak mau harus dipatuhi oleh Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. | 2019 |
|--|---|------|

Bahtiar Rifa'i - detikNews: "500 Warga Baduy Dalam Pilih Golput di Pemilu" Pilihan tak mencoblos merupakan aturan adat Baduy Dalam yang mau tak mau harus dipatuhi oleh Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana[10].

Peneliti lain yang mempelajari fenomena golput adalah Efniwati yang kajiannya berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Hak Pilih pada Pilpres Kota Dumai Tahun 2009 (Studi Kasus Kabupaten Dumai Timur dan Distrik Say Sembilan)". Penelitian Efniwati yang dilakukannya di dua kecamatan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada dua faktor di lingkungannya yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat yang tidak memilih. Faktor pekerjaan responden menjadi penyebab terbesar memilih tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 16,9%. Sedangkan di Desa Bangsar Aceh, faktor lokasi TPS (X12) menjadi faktor terbesar bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan hak pilihnya. hak pilih dalam pemilihan presiden. Pada tahun 2009 adalah 15,9%. Selama ini banyak pernyataan dari pemantau pemilu atau penyelenggara pemilu tentang alasan golput mereka. administrasi pertama. Pemilih tidak mencoblos karena menghadapi prosedur administratif seperti: B. Tidak ada KTP, tidak ada dalam daftar pemilih, dll. Misalnya ada yang memutuskan tidak mencoblos karena harus bekerja pada hari pencoblosan, sedang membutuhkan, atau harus mencoblos. meninggalkan kota pada Hari Pemilihan, atau karena mereka tidak punya waktu untuk memilih. Ketiga, keterlibatan atau ketertarikan dalam politik (political engagement) sangat kecil. Ada orang yang tidak mencoblos karena tidak tertarik dengan politik, cuek, tidak peduli dengan pilkada dan pilkada. Keempat, perhitungan yang masuk akal. Pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena memilih untuk tidak memilih. Pemilihan parlemen dinilai tidak relevan dan tidak akan membawa banyak perubahan. Atau, tidak ada calon kepala daerah yang menguntungkan[11][12].

Tabel 2. Persentase Golput dari Tahun ke Tahun

| Tahun | Persentase Golput (%) |
|-------|-----------------------|
| 1955 | 13.00 |
| 1971 | 6.67 |
| 1977 | 8.40 |
| 1982 | 9.61 |
| 1987 | 8.39 |
| 1992 | 9.05 |

| | |
|-------------------|-------|
| 1997 | 12.07 |
| 1999 | 10.04 |
| 2004 (Pileg) | 23.00 |
| 2004 (Pilpres I) | 23.00 |
| 2004 (Pilpres II) | 25.00 |
| 2009 (Pileg) | 29.01 |
| 2009 (Pilpres) | 27.77 |

Ini jelas dari tabel pada tahun 1955 hampir 13%, pada pemilu tahun 1971, absensi mencapai 6,67%. Bandingkan tingkat abstain pada tahun 1955 dalam pemilihan tahun 1971 dimungkinkan oleh 1955 adalah pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia. Angka buta huruf di Indonesia juga masih sangat tinggi selama periode ini. Meskipun pada tahun 1971 Orde Baru melakukan kebijakan pembangunan secara signifikan yang salah satunya diwujudkan dengan pemberantasan buta huruf melalui pendirian Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres). Golput dari satu pemilihan ke pemilihan lainnya bukannya turun justru bertambah. Misalnya, pemilu 1977 melihat peningkatan jumlah golput ke 8,40% dan 9,61% Pada tahun 1982. Jumlahnya sedikit menurun pada pemilu 1987 adalah 8,39%. Golput meningkat lagi pada tahun 1992 menjadi 9,05% dan 12,07% pada tahun 1997[13][14].

Jumlah ini terus bertambah Pasca reformasi, misalnya, dia memiliki angka golput 10,4% pada pemilu 1999. 23% pada pemilu 2004 dan Jumlah golput menurun pada pemilu 2009 mencapai 29,01%, 27, 77% dalam pemilihan presiden. Dari angka-angka selama masa reformasi angka golput bisa mengalahkan partai pemenang pilihan yang baik dalam pemilihan umum dan dalam pemilihan presiden. Pemilih yang tidak hadir sangat mungkin pada pemilu tahun 1977 di atas dipengaruhi pesona pengikut Golput Pada awal 1970-an, pemilih Indonesia juga belum menggunakan hak pilihnya dengan menaruh banyak tanda foto, tidak pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) ataupun menembus bagian putih kartu suara[15], [16].

D. SIMPULAN DAN SARAN

Jika kita melihat hasil pemilihan parlemen dan presiden berturut-turut, kita akan melihat bahwa ada kecenderungan peningkatan persentase golput dari satu siklus pemilihan ke pemilihan berikutnya. Sebagian besar alasan masyarakat untuk tidak memilih adalah karena masalah ekonomi lebih penting daripada politik, ketidakpercayaan terhadap pemimpin, kurangnya pengetahuan sehingga menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap sistem demokrasi negara.

Meningkatnya jumlah orang yang tidak memilih dalam pemilu harus diminimalkan semaksimal mungkin. Karena legitimasi pemimpin terpilih juga secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pemilu. Golput memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil dari terselenggaranya pemilu dengan baik dan lancar. Tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dengan kekuatan dukungan mereka.

Golput tidak akan bisa dihapuskan secara langsung, tetapi bisa dikurangi. Salah satu upaya untuk

mengurangi golput adalah tindakan dari pemerintah sendiri dengan memberikan pendidikan atau sosialisasi tentang pentingnya demokrasi dalam suatu negara. Kemudian, pastikan pemilih memiliki informasi yang akurat tentang calon, partai, dan isu-isu yang sesuai, sehingga pemilih dapat mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan pemilu juga mempengaruhi sedikit banyaknya golput yang terjadi. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan sistem pemilihan yang bersih dari politik uang, manipulasi, dan kecurangan lain yang membuat masyarakat merasa sia-sia dalam memberikan hak suaranya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah. Penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taun selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membimbing kami dalam menyusun artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. Abdurrahman, "Partisipasi Politik Rakyat dan Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Proses Pemilihan Umum di Indonesia," *Gema Keadilan*, vol. 1, no. 1, pp. 17–22, 2014.
- [2] M. Muhsinun, "Pandangan Politik Driver Gojek Online Terhadap Tagar 2019 Ganti Presiden (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- [3] B. Arianto, "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu," *J. Ilmu Polit. dan Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, pp. 51–60, 2011.
- [4] M. Mahpudin, "Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal di Kabupaten Lebak, Banten," *Inovasi*, vol. 18, no. 2, pp. 237–249, 2021.
- [5] N. Nazaruddin and W. Warsono, "Strategi Politik Partai Perindo Dalam Mendulang Suara Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019," *J. Polit. dan Pemerintah. Drh.*, vol. 3, no. 1, pp. 28–34, 2021.
- [6] R. Hutabalian and E. A. Budiman, "Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum," *J. Huk. Ius Publicum*, vol. 2, no. 2, pp. 218–229, 2022.
- [7] M. S. Ritaudin, "Fenomena Teman Ahok Menghancurkan Politik Partai," *J. Tapis J. Teropong Aspir. Polit. Islam*, vol. 12, no. 2, pp. 30–56, 2016.
- [8] N. Subanda, "Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu," *J. Konstitusi*, vol. 2, no. 1, pp. 60–72, 2009.
- [9] W. T. Hardianto, A. P. Sili, and F. Firdausi, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di KPU Kota Batu)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 11, no. 2, pp. 144–151, 2022.
- [10] Loka data bertidar, "Persentase Golput Pemilu

- [11] M. R. Iswardhana, G. A. Maharani, W. G. Tayan, and A. Nuraini, "Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput Pada Pemilu 2024 untuk Generasi Muda," *PaKMas J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 117–122, 2023.
- [12] D. N. Ramadhanti, "Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik," *Cive J. Penelit. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 9, pp. 361–366, 2022.
- [13] S. Yanuarti, "Golput dan pemilu di Indonesia," *J. Penelit. Polit.*, vol. 6, no. 1, pp. 21–32, 2009.
- [14] D. Kurniawan, H. Harun, H. Umar, and R. Ramlah, "Golput dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 4, pp. 706–716, 2023.
- [15] H. N. M. Napitupulu and A. I. Sagala, "Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)," *Civ. J. Ilmu Pendidik. PKN dan Sos. Budaya*, vol. 3, no. 1, 2019.
- [16] B. Ulum, "Fatwa of the Council of Indonesian Ulama on Golput (Vote Abstention): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009," *MIQOT J. Ilmu-ilmu Keislam.*, vol. 35, no. 2, 2011.